

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Tapin



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Datu Nuraya RT.01 Kel. Rangda Malingkung Kec.
Tapin Utara, Kawasan Rantau Baru, Rantau, 71111

Website : <http://bkad.profile.tapinkab.go.id>

E-mail : bpkadkabtapin@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rantau, Februari 2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin



Haris Fadhliah, SE.,MM
NIP. 19740626 200501 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja	23
3.2 Efisiensi Anggaran	82
BAB IV PENUTUP.....	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	8
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun n	10
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	10
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n.....	11
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3.3	Sasaran Kinerja 1 Pada Tahun 2024.....	25
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran 1 Pada Tahun 2024.....	28
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Dimensi IPKD Tahun 2024	29
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Pada Tahun 2024	29
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Dimensi IPKD Tahun 2024	30
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Pada Tahun 2024	30
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Target Nasional Pada Tahun 2024	31
Tabel 3.10	Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	24
Tabel 3.11	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1 Tahun 2024.....	37
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024	38
Tabel 3.13	Capaian Pemenuhan Anggaran Mandatory Spending Tahun 2024	47
Tabel 3.14	Capaian Dokumen Laporan Bendahara Umum Daerah Yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan Tahun 2024	48

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024	58
Tabel 3.16 Capaian Komponen SAKIP Tahun 2024	58
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024	59
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Komponen Sasaran 2 Tahun 2024.....	59
Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah	60
Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 Dengan Target Nasional	60
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 Dengan Nilai Standar Nasional	61
Tabel 3.22 Perbandingan Capaian dengan Capaian Kabupaten dan Provinsi Tahun 2024.....	61
Tabel 3.23 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2 Tahun 2024.....	63
Tabel 3.24 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pada Sasaran Tahun 2024	64
Tabel 3.25 Indikator Dan Rumus Hitung Pada Sasaran 3 Tahun 2024	69
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024	71
Tabel 3.27 Capaian Kinerja 4 Dimensi Utama Sasaran 3 Tahun 2024	72
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	72
Tabel 3.29 Capaian Kinerja 4 Dimensi Utama Sasaran 3 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	73
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah	73
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Standar Nasional	74
Tabel 3.32 Capaian Kinerja 4 Dimensi Sasaran 3 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Standar Nasional.....	74

Tabel 3.33 Perbandingan Capaian dengan Capaian Kabupaten/Provinsi	75
Tabel 3.34 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 3 Tahun 2024	77
Tabel 3.35 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pada Sasaran 3 Tahun 2024.....	78
Tabel 3.36 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Keuangan dan Aset Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, mempunyai tugas: Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

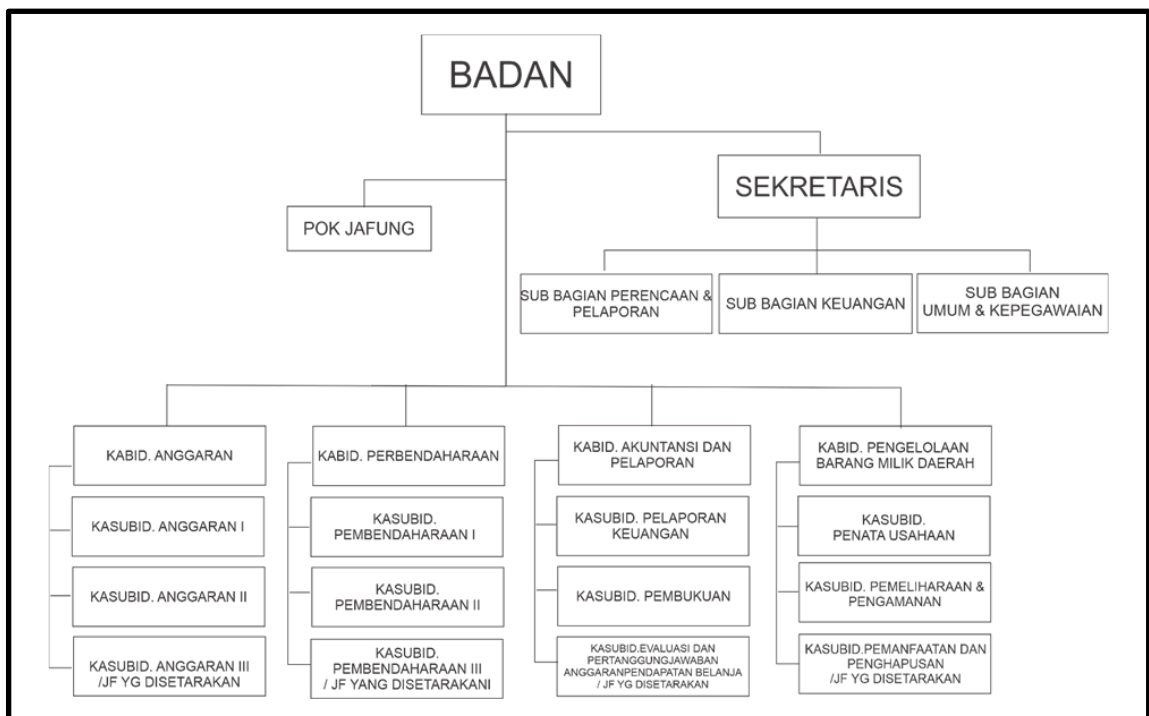
- Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah;
- Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah dan investasi;
- Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan daerah;

- o pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- o pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah;
- o pelaksanaan koordinasi pembukuan anggaran (Akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- o Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- o Pelayanan administrasi dan pengelolaan kesekretariatan; dan
- o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber : Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp.314.622.568.050,-
APBD	Tahun n	Rp.288.595.467.688,-
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp.-

Sumber : CALK BKAD

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran Daerah	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target			
					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	A	A	A	A
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks	-	-	65	66	67	67
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	54,02	64,96	80	81	82	82

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Periode 2024 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4. Penyerapan anggaran; 5. Kondisi keuangan daerah; 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.	Pengukuran IPKD di Kabupaten/ Kota dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari : 1. Bappeda Kab/Kota terkait dokumen RPJMD dan RKPD; 2. Badan Pengelola Keuangan terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD; 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD; 4. Sistem Informasi Pemerinta

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						han Daerah.
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Sistem yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	SAKIP diukur melalui 4 (empat) komponen penilaian meliputi : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Internal	Dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian
3	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	IP-ASN Perangkat Daerah diukur dari 4 (empat) dimensi yaitu : 1. Kualifikasi 2. Kompetensi 3. Kinerja kedisiplinan	Dokumen kualifikasi pendidikan, pelatihan, penilaian prestasi kinerja pegawai, data hukuman disiplin pegawai

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
3	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah:

**Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2024**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP : Perencanaan Kinerja	30
		Nilai Komponen AKIP : Pengukuran Kinerja	30
		Nilai Komponen AKIP : Pelaporan Kinerja	15
		Nilai Komponen AKIP : Evaluasi Internal	25
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	95
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	34
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	90
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu	100
		Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan	100
		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sub kegiatan yang sesuai mandatory spending murni	100
		Persentase Penyusunan Anggaran murni yang Tepat Waktu	100

		Persentase sub kegiatan yang sesuai mandatory spending perubahan	100
		Persentase penyusunan anggaran perubahan yang tepat waktu	100
		Persentase sub kegiatan yang sesuai mandatory spending KUA-PPAS	100
		Persentase Penyusunan Anggaran KUA-PPAS yang Tepat Waktu	100
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	58
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	58
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	58
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	58
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	4
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	4

	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	4
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase peserta bimtek pembinaan penatausahaan keuangan yang lulus passing grade pada Badan dan Kecamatan di lingkungan Pemkab.Tapin	75
		Persentase input penatausahaan dan pelaporan yang tepat waktu dan akurat pada Badan dan Kecamatan di lingkungan Pemkab.Tapin	100
		Persentase peserta bimtek pembinaan penatausahaan keuangan yang lulus passing grade Dinas di lingkungan Pemkab.Tapin	75
		Persentase input penatausahaan dan pelaporan yang tepat waktu dan akurat Dinas di lingkungan Pemkab.Tapin	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen koordinasi pengelolaan kas daerah	52
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil penerbitan anggaran kas dan SPD	4
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen hasil penatausahaan pembiayaan daerah	2

	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	116
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12

	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	2
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90

	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase administrasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diproses sesuai ketentuan	100
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	12
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian pentausahaan barang milik daerah antara pengelola barang milik daerah dengan SKPD	100
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai SOP/Peraturan/Undang-Undang Pengelolaan Aset	100

		Persentase tindaklanjut hasil usulan perangkat daserah atas barang milik daerah yang dilakukan Pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan	100
		Jumlah Usulan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) SKPD	1
		Jumlah Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD	1
		Persentase SKPD yang melaporkan atau memperbaharui data pengamanan Barang Milik Daerah	100
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	2
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	0
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	180
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	45
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	90
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	180
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	2
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten/Kota	180

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nama Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	66,977	89,30	Tinggi	82
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	74,60	Sedang	A

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	75,01	115,40	Tinggi	67

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

A. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

A.1 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah diukur dengan indikator dan rumus hitung sebagai berikut :

Tabel 3.3 Sasaran Kinerja 1 Pada Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Hitung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	IPKD ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 IPKD memiliki skala nilai dari 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai IPKD, semakin baik kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah.

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Hitung
(1)	(2)	(3)	(4)
			IPKD dikukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4. Penyerapan anggaran; 5. Kondisi keuangan daerah; 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Tujuan utama dari IPKD adalah untuk:

1. Mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.
2. Memberikan gambaran kinerja fiskal pemerintah daerah.
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan penyerapan

anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

IPKD terdiri dari 6 dimensi utama yang mencerminkan aspek-aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Mengukur keterpaduan antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dan penganggaran (APBD).
2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD
Menilai proporsi anggaran terhadap program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
3. Transparansi Keuangan Daerah
Menilai sejauh mana informasi keuangan daerah tersedia dan dapat diakses oleh publik.
4. Penyerapan Anggaran
Mengukur tingkat realisasi belanja daerah terhadap total anggaran yang ditetapkan.
5. Kondisi Keuangan Daerah
Menilai struktur keuangan daerah seperti rasio pendapatan asli daerah (PAD), belanja operasi, dan kapasitas fiskal.
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP, dsb.

Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah:

Dimensi	Uraian	Bobot
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	15
2	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	15
4	Penyerapan Anggaran	20
5	Kondisi Keuangan Daerah	15

6	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	15
	Indeks Total	100

Nilai IPKD disusun dalam bentuk skor yang menghasilkan kategori penilaian, yaitu:

- Sangat Baik
- Baik
- Sedang
- Kurang
- Sangat Kurang

Manfaat IPKD:

- Bagi Pemerintah Pusat: Sebagai acuan dalam pembinaan dan pengawasan keuangan daerah.
- Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai cermin untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.
- Bagi Masyarakat dan DPRD: Memberikan informasi publik tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 1 Pada Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	66,977	89,30	Tinggi

Analisis ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Indikator IPKD Tercapai 66,977 Poin terhadap target sebesar 75 Poin, dengan demikian prosentase terhadap target sebesar 89,30%.

Nilai indeks sebesar 66,977 yang di peroleh Kabupaten Tapin merupakan penjumlahan dari 6 Dimensi, antara lain:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Dimensi IPKD Tahun 2024

Dimensi	Uraian	Bobot
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	11,013
2	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	15
4	Penyerapan Anggaran	5
5	Kondisi Keuangan Daerah	0,964
6	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	15
	Indeks Total	66,977

- A.2 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Pada Tahun 2024

No.	Indikator	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	64,96	86,61	75	66,977	89,30

Capaian indikator kinerja IPKD tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yaitu dari nilai 86,61% menjadi 89,30% meningkat sebesar 2,69%. Nilai Realisasi IPKD 2023 dan 2024 per dimensi dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Dimensi IPKD
Tahun 2024**

Dimensi	Uraian	Bobot 2023	Bobot 2024
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10,187	11,013
2	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20	20
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	7,5	15
4	Penyerapan Anggaran	10	5
5	Kondisi Keuangan Daerah	2,277	0,964
6	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	15	15
	Indeks Total	64,964	66,977

A.3 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dibandingkan dengan target jangka menengah

**Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Pada
Tahun 2024**

No.	Indikator	2024			Target Akhir RPD	Capaian s.d 2024 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	66,977	89,30	82	81,68

Capaian target indikator IPKD pada tahun 2024 terhadap target tahun 2026 sebesar 81,68%, walaupun belum 100% tetapi optimis target indikator ini akan tercapai pada tahun 2026 dengan komitmen bersama kepala daerah dan seluruh OPD di Kabupaten Tapin.

- A.4 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dibandingkan dengan standar nasional.

**Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Sasaran 1 Dibandingkan Target Nasional Pada Tahun 2024**

No.	Indikator	2024			Standar Nasional	Capaian 2024 terhadap Standar Nasional (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	66,977	89,30	100	66,977

Capaian target indikator IPKD pada tahun 2024 terhadap standar nasional adalah sebesar 66,977% dengan peringkat Perlu perbaikan dan kategori Nilai B.

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Tinggi” sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
1	BANGKA	14,977	20	14,483	20	0,831	15	85,291	Baik	A
2	JAYAPURA	11,819	19,828	15	20	1,648	15	83,294	Baik	A
3	MOROWALI	9,046	19,483	14,224	20	3,304	15	81,056	Baik	A
4	LAMANDAU	14,602	20	15	15	1,446	15	81,047	Baik	A
5	BALANGAN	12,97	20	15	15	2,718	15	80,688	Baik	A
6	LUMAJANG	14,059	14,828	15	20	1,532	15	80,419	Baik	A
7	LUWU TIMUR	13,47	20	15	15	1,941	15	80,411	Baik	A
8	GIANYAR	13,196	20	14,483	15	2,673	15	80,352	Baik	A
9	HULU SUNGAI UTARA	13,737	20	14,741	15	1,698	15	80,176	Baik	A
10	TANAH LAUT	13,335	19,828	15	15	1,483	15	79,645	Baik	A
11	BANGKA SELATAN	14,74	19,31	14,483	15	0,938	15	79,471	Perlu Perbaikan	B
12	KUTAI KARTANEGARA	12,001	20	13,19	15	4,267	15	79,458	Perlu Perbaikan	B
13	SUMBA TENGAH	10,997	20	14,741	15	3,666	15	79,405	Perlu Perbaikan	B
14	TABALONG	12,25	20	15	15	2,067	15	79,317	Perlu Perbaikan	B
15	PASER	10,57	20	15	15	2,986	15	78,556	Perlu Perbaikan	B
16	MALINAU	10,26	18,793	15	15	4,116	15	78,169	Perlu Perbaikan	B
17	SLEMAN	10,914	20	14,483	15	2,434	15	77,832	Perlu Perbaikan	B
18	NATUNA	10,313	20	15	15	2,294	15	77,607	Perlu Perbaikan	B
19	BADUNG	12,214	20	14,483	10	5,658	15	77,355	Perlu Perbaikan	B
20	HULU SUNGAI SELATAN	10,307	20	15	15	1,832	15	77,14	Perlu Perbaikan	B
21	MALANG	10,348	20	15	15	1,789	15	77,137	Perlu Perbaikan	B
22	JEMBER	14,943	20	15	15	1,627	10,005	76,575	Perlu Perbaikan	B
23	BERAU	8,883	19,655	12,931	15	4,995	15	76,464	Perlu Perbaikan	B
24	SUKABUMI	10,027	19,655	15	15	1,546	15	76,228	Perlu Perbaikan	B
25	KOTABARU	12,925	20	15	10	2,617	15	75,542	Perlu Perbaikan	B
26	KATINGAN	9,863	19,483	14,483	15	1,673	15	75,502	Perlu Perbaikan	B
27	BULUNGAN	9,638	19,655	13,19	15	2,98	15	75,463	Perlu Perbaikan	B
28	KONAWA KEPULAUAN	11,568	19,828	12,155	15	1,703	15	75,253	Perlu Perbaikan	B
29	PELALAWAN	11,46	13,966	13,448	20	1,368	15	75,241	Perlu Perbaikan	B
30	KABUPATEN BANDUNG	12,214	19,828	10,862	15	2,261	15	75,165	Perlu Perbaikan	B
31	BOJONEGORO	11,716	19,655	14,741	10	3,874	15	74,986	Perlu Perbaikan	B
32	LAHAT	9,287	19,31	13,707	15	2,462	15	74,766	Perlu Perbaikan	B
33	BUTON TENGAH	10,577	19,483	13,448	15	1,163	15	74,671	Perlu Perbaikan	B
34	PASURUAN	8,24	20	14,741	15	1,55	15	74,531	Perlu Perbaikan	B
35	KUTAI TIMUR	10,382	20	13,448	15	4,989	10,005	73,825	Perlu Perbaikan	B
36	TANAH BUMBU	9,086	19,655	11,638	15	3,377	15	73,757	Perlu Perbaikan	B
37	MAMUJU TENGAH	8,906	20	13,707	15	1,087	15	73,7	Perlu Perbaikan	B
38	MUSI RAWAS UTARA	9,497	20	12,414	15	1,779	15	73,689	Perlu Perbaikan	B
39	TOLIKARA	10,475	18,621	7,759	20	1,829	15	73,684	Perlu Perbaikan	B
40	TANGERANG	5,96	19,31	14,224	15	3,962	15	73,456	Perlu Perbaikan	B
41	SUMBAWA BARAT	9	20	10,603	15	3,216	15	72,82	Perlu Perbaikan	B
42	MUSI RAWAS	7,209	19,655	14,224	15	1,552	15	72,64	Perlu Perbaikan	B

43	SIDOARJO	4,283	19,655	14,224	15	4,299	15	72,461	Perlu Perbaikan	B
44	PULANG PISAU	11,63	19,138	10,086	15	1,603	15	72,458	Perlu Perbaikan	B
45	KEPULAUAN SELAYAR	12,075	20	9,052	15	1,193	15	72,32	Perlu Perbaikan	B
46	NUNUKAN	11,458	19,655	9,052	15	2,155	15	72,32	Perlu Perbaikan	B
47	BATANGHARI	6,122	19,483	15	15	1,105	15	71,71	Perlu Perbaikan	B
48	SUKAMARA	10,389	19,31	9,828	15	2,165	15	71,692	Perlu Perbaikan	B
49	BEKASI	13,061	15	15	15	3,461	10,005	71,526	Perlu Perbaikan	B
50	MALAKA	13,544	19,138	2,586	20	0,837	15	71,105	Perlu Perbaikan	B
51	MURUNG RAYA	8,47	18,621	10,345	15	3,525	15	70,961	Perlu Perbaikan	B
52	KARIMUN	9,462	19,655	15	10	1,524	15	70,641	Perlu Perbaikan	B
53	SANGGAU	9,837	14,828	14,483	15	1,43	15	70,577	Perlu Perbaikan	B
54	BOMBANA	9,348	19,655	15	10	1,28	15	70,283	Perlu Perbaikan	B
55	KEPULAUAN MERANTI	11,218	18,448	13,966	15	1,158	10,005	69,795	Perlu Perbaikan	B
56	BARITO UTARA	7,85	20	8,534	15	3,307	15	69,692	Perlu Perbaikan	B
57	MANGGARAI BARAT	8,61	19,31	10,345	15	1,261	15	69,527	Perlu Perbaikan	B
58	LAMONGAN	8,333	15	14,483	15	1,513	15	69,329	Perlu Perbaikan	B
59	KEPULAUAN MENTAWAI	7,784	20	14,741	15	1,477	10,005	69,007	Perlu Perbaikan	B
60	MALUKU TENGGARA	9,164	19,138	9,31	15	1,261	15	68,873	Perlu Perbaikan	B
61	HULU SUNGAI TENGAH	7,873	19,655	9,052	15	1,893	15	68,473	Perlu Perbaikan	B
62	BUTON UTARA	9,129	19,828	8,793	15	0,702	15	68,452	Perlu Perbaikan	B
63	KUTAI BARAT	10,052	19,655	13,966	5	4,432	15	68,106	Perlu Perbaikan	B
64	SERUYAN	8,631	19,655	7,759	15	1,796	15	67,84	Perlu Perbaikan	B
65	BUTON SELATAN	7,334	19,483	14,483	15	1,253	10,005	67,557	Perlu Perbaikan	B
66	KOLAKA	6,492	14,483	14,483	15	1,946	15	67,404	Perlu Perbaikan	B
67	TAPIN	11,013	20	15	5	0,964	15	66,977	Perlu Perbaikan	B
68	TAPANULI SELATAN	9,802	19,655	5,948	15	1,555	15	66,961	Perlu Perbaikan	B
69	BANYUWANGI	8,309	14,655	11,897	15	1,427	15	66,288	Perlu Perbaikan	B
70	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	10,326	19,655	13,966	15	2,151	5,01	66,108	Perlu Perbaikan	B
71	MUSI BANYUASIN	14,529	20	14,483	15	1,853	0	65,864	Perlu Perbaikan	B
72	PANIAI	9,528	18,621	4,655	15	1,448	15	64,252	Perlu Perbaikan	B
73	BENGKALIS	11,239	20	5,69	10	2,236	15	64,164	Perlu Perbaikan	B
74	NIAS SELATAN	10,606	19,483	7,759	15	0,983	10,005	63,835	Perlu Perbaikan	B
75	SUMBA BARAT DAYA	11,655	18,966	2,069	15	0,79	15	63,479	Perlu Perbaikan	B
76	EMPAT LAWANG	13,451	18,793	10,345	5	0,877	15	63,466	Perlu Perbaikan	B
77	GRESIK	9,311	15	11,379	10	2,463	15	63,154	Perlu Perbaikan	B
78	SABU RAIJUA	7,603	14,655	9,31	15	1,083	15	62,651	Perlu Perbaikan	B
79	MIMIKA	12,289	15	0	15	5,179	15	62,469	Perlu Perbaikan	B
80	KEDIRI	9,495	19,483	1,81	15	1,665	15	62,453	Perlu Perbaikan	B
81	SUMBA BARAT	8,44	15	7,241	15	1,207	15	61,889	Perlu Perbaikan	B
82	MAHAKAM ULU	10,243	9,138	9,569	10	7,091	15	61,041	Perlu Perbaikan	B
83	KOLAKA TIMUR	10,741	19,138	4,914	15	1,049	10,005	60,847	Perlu Perbaikan	B
84	KAPUAS	11,486	19,655	7,5	15	2,189	5,01	60,841	Perlu Perbaikan	B

85	BATU BARA	9,42	19,655	5,948	15	0,749	10,005	60,778	Perlu Perbaikan	B
86	TANA TIDUNG	5,883	14,483	4,914	15	4,875	15	60,155	Perlu Perbaikan	B
87	NIAS UTARA	8,189	18,276	12,155	15	0,899	5,01	59,529	Perlu Perbaikan	B
88	HALMAHERA UTARA	13,596	20	4,655	5	0,911	15	59,162	Perlu Perbaikan	B
89	PULAU MOROTAI	9,415	12,931	0,517	20	1,059	15	58,923	Perlu Perbaikan	B
90	WAKATOBI	8,401	14,828	4,138	15	1,227	15	58,594	Perlu Perbaikan	B
91	HALMAHERA SELATAN	10,127	9,828	6,466	15	2,142	15	58,562	Perlu Perbaikan	B
92	KONAWE UTARA	8,743	13,276	3,362	15	3,171	15	58,552	Perlu Perbaikan	B
93	PANGANDARAN	9,166	20	12,672	10	0,815	5,01	57,664	Perlu Perbaikan	B
94	KEPULAUAN SULA	12,212	13,966	0,259	15	0,9	15	57,336	Perlu Perbaikan	B
95	BOGOR	9,187	15	7,759	20	4,389	0	56,335	Sangat Perlu Perbaikan	C
96	SARMI	12,083	18,621	7,241	15	2,539	0	55,485	Sangat Perlu Perbaikan	C
97	HALMAHERA TENGAH	10,523	8,448	6,466	10	4,597	15	55,034	Sangat Perlu Perbaikan	C
98	DEIYAI	6,633	15	0,259	20	2,019	10,005	53,916	Sangat Perlu Perbaikan	C
99	PENAJAM PASER UTARA	8,352	15	8,017	15	2,251	5,01	53,631	Sangat Perlu Perbaikan	C
100	BURU SELATAN	10,152	16,897	4,655	20	1,309	0	53,013	Sangat Perlu Perbaikan	C
101	ASMAT	12,345	17,759	0	15	2,355	5,01	52,47	Sangat Perlu Perbaikan	C
102	PULAU TALIABU	10,526	11,724	0	5	2,216	0	29,467	Sangat Perlu Perbaikan	C
103	MALUKU BARAT DAYA	10,087	0	0	0	0,947	15	26,034	Sangat Perlu Perbaikan	C
104	MAPPI	6,136	0	0	15	1,921	0	23,057	Sangat Perlu Perbaikan	C
105	KEPULAUAN ARU	2,206	8,103	0	10	1,516	0	21,826	Sangat Perlu Perbaikan	C
RATA-RATA									68,001	
STANDAR DEVIASI									11,623	

Pada hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Kabupaten Tapin berada pada peringkat 67 dari total 105 Kabupaten kategori Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Tinggi” sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No. Urut	Kab/Kota	Dimensi						Indeks Total	Peringkat	Nilai
		1	2	3	4	5	6			
1	Balangan	12,97	20	15	15	2,718	15	80,688	Baik	A
2	Hulu Sungai Utara	13,737	20	14,741	15	1,698	15	80,176	Baik	A
3	Tanah Laut	13,335	19,828	15	15	1,483	15	79,646	Baik	A

4	Tabalong	12,25	20	15	15	2,067	15	79,317	Perlu Perbaikan	B
5	Hulu Sungai Selatan	10,307	20	15	15	1,832	15	77,139	Perlu Perbaikan	B
6	Kotabaru	12,925	20	15	10	2,617	15	75,542	Perlu Perbaikan	B
7	Tanah Bumbu	9,086	19,655	11,638	15	3,377	15	73,756	Perlu Perbaikan	B
8	Banjarmasin	12,174	19,828	14,741	6,667	1,811	15	70,221	Perlu Perbaikan	B
9	Hulu Sungai Tengah	7,873	19,655	9,052	15	1,893	15	68,473	Perlu Perbaikan	B
10	Banjarbaru	6,868	20	8,534	15	2,157	15	67,559	Perlu Perbaikan	B
11	Tapin	11,013	20	15	5	0,964	15	66,977	Perlu Perbaikan	B

Sumber : SK Mendagri No.900.1.15.3-372 Tahun 2024

Apabila di rekap dalam rentang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 11 Kabupaten/Kota pada kategori ini. Dalam wilayah provinsi ini, Kabupaten Tapin berada pada urutan ke 11 nya.

A.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Sasaran 1, dengan indikator Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah :

Faktor Pendukung

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

- Meningkat dari 10,19 poin menjadi 11,01 poin.
- Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam konsistensi dan integrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah.

2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

- Mencapai 100%.
- Ini berarti seluruh rencana belanja telah teralokasikan secara optimal dalam APBD.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mencapai 100%.
- Menunjukkan bahwa daerah telah membuka akses informasi keuangan secara penuh kepada publik.

4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD

- Mencapai 100%.
- Menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah mendapat opini terbaik dari BPK, yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Faktor Penghambat

1. Penyerapan Anggaran

- Mengalami penurunan signifikan dari 10 poin menjadi 5 poin.
- Hal ini dapat mengindikasikan lambannya realisasi program/kegiatan meskipun anggaran tersedia.

2. Kondisi Keuangan Daerah

- Turun dari 2,277 poin menjadi 0,964 poin.
- Ini menunjukkan memburuknya kapasitas fiskal atau berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD), hibah, atau dana transfer.

Alternative solusi yang telah dilakukan

1. Menjaga konsistensi dari faktor pendukung seperti Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD
2. Membuat edaran Sekretaris Daerah agar seluruh SKPD melakukan percepatan penyerapan anggaran

3. Melakukan koordinasi dengan SKPD pengampu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
4. Mempercepat pelaksanaan dana hibah dan dana transfer sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Selain capaian kinerja IPKD tahun 2024 89,30% meningkat dari tahun 2023 86,61%, realisasi anggaran terkait pencapaian IPKD juga mengalami efisiensi, yaitu dari yang dianggarkan sebesar Rp273.732.538.582,- terealisasi sebesar Rp.177.408.766.155,- atau terjadi efisiensi sebesar Rp96.323.772.427,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.11 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada Sasaran 1 Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	66,977	89,30	273.732.538.582	177.408.766.155	64,81	96.323.772.427

A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pada Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
	1.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sub kegiatan yang sesuai mandatory spending murni	100%	100%	100%
		Persentase Penyusunan Anggaran murni yang Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase sub kegiatan yang sesuai mandatory spending perubahan	100%	100%	100%
		Persentase penyusunan anggaran perubahan yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase sub kegiatan yang sesuai mandatory spending KUA-PPAS	100%	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Persentase Penyusunan Anggaran KUA-PPAS yang Tepat Waktu	100%	100%	100%
	1.1.1.Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	100%
	1.1.2.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	58 Dok	58 Dok	100%
	1.1.3.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	58 Dok	58 Dok	100%
	1.1.4.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	58 Dok	58 Dok	100%
	1.1.5.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	58 Dok	58 Dok	100%
	1.1.6.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	58 Dok	58 Dok	100%
	1.1.7.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	4 Dok	4 Dok	100%
	1.1.8.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang	4 Dok	4 Dok	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		penjabaran perubahan APBD			
	1.1.9.Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	4 Dok	4 Dok	100%
	1.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase peserta bimtek pembinaan penatausahaan keuangan yang lulus passing grade pada Badan dan Kecamatan di lingkungan Pemkab.Tapin	75%	75%	100%
		Persentase input penatausahaan dan pelaporan yang tepat waktu dan akurat pada Badan dan Kecamatan di lingkungan Pemkab.Tapin	100%	100%	100%
		Persentase peserta bimtek pembinaan penatausahaan keuangan yang lulus passing grade Dinas di lingkungan Pemkab.Tapin	75%	75%	100%
		Persentase input penatausahaan dan pelaporan yang tepat waktu dan akurat Dinas di lingkungan Pemkab.Tapin	100%	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.2.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen koordinasi pengelolaan kas daerah	52 Dok	52 Dok	100%
	1.2.2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil penerbitan anggaran kas dan SPD	4 Dok	4 Dok	100%
	1.2.3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen hasil penatausahaan pembiayaan daerah	2 Dok	2 Dok	100%
	1.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dok	2 Dok	100%
	1.2.5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17 Dok	17 Dok	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.2.6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Org	116 Org	100%
	1.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	1.3.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap	12 Lap	100%
	1.3.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dok	1 Dok	100%
	1.3.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Lap	3 Lap	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				
	1.3.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	2 Lap	2 Lap	100%
	1.3.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	1.3.6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Org	90 Org	100%
	1.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase administrasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang	100%	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		diproses sesuai ketentuan			
	1.4.1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4 lap	4 lap	100%
	1.4.2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Lap	12 Lap	100%
	1.4.3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Lap	12 Lap	100%
	1.4.4. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Lap	12 Lap	100%
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase kesesuaian pentausahaan barang milik daerah antara pengelola barang milik daerah dengan SKPD	100%	100%	100%
	1.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai SOP/Peraturan/Undang-Undang Pengelolaan Aset	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut hasil usulan perangkat daerah atas barang milik daerah yang dilakukan Pemanfaatan,	100%	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		pemindahtanganan dan penghapusan			
		Jumlah Usulan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
		Persentase SKPD yang melaporkan atau memperbaharui data pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
	1.1.1.Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SH)	2 Dok	2 Dok	100%
	1.1.2.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	2 Dok	100%
	1.1.3.Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	180 Lap	180 Lap	100%
	1.1.4.Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	45 Lap	45 Lap	100%
	1.1.5.Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1 Lap	1 Lap	100%
	1.1.6.Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	90 Dok	90 Dok	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Penghapusan Barang Milik Daerah			
	1.1.7.Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	180 Lap	180 Lap	100%
	1.1.8.Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	2 Lap	2 Lap	100%
	1.1.9.Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten/Kota	180 Org	180 Org	100%

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 1) Target capaian indikator Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu tahun 2024 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%. Capaian ini dibuktikan dengan Mandatory Spending sampai dengan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024 (berdasarkan PMK Nomor 24 Tahun 2024):

**Tabel 3.13 Capaian Pemenuhan Anggaran Mandatory Spending
Tahun 2024**

No	Kategori	Standar	Realisasi	Ket
1	Belanja Pendidikan	Paling rendah 20% dari total belanja daerah	20,06%	Memenuhi
2	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Paling rendah 40% dari total belanja daerah, diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	59,52%	Memenuhi
3	Belanja Pegawai	Paling tinggi 30% dari total belanja daerah	17,13%	Memenuhi

- 2) Target capaian indikator Persentase dokumen laporan bendahara umum daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan tahun 2024 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%. Capaian ini dibuktikan dengan Dokumen register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk

pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Berikut data rekap laporan Register SP2D yang dilakukan setiap bulan:

**Tabel 3.14 Capaian Dokumen Laporan Bendahara Umum Daerah
Yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan Tahun 2024**

No	Bulan	Jumlah Register SP2D
1	Januari	67
2	Februari	212
3	Maret	354
4	April	446
5	Mei	2132
6	Juni	674
7	Juli	554
8	Agustus	572
9	September	863
10	Oktober	1061
11	November	1087
12	Desember	1508
Total		9530

Sumber Register SP2D Bidang Perbendaharaan

Dari hasil diatas dapat diketahui selama tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Desember, BKAD telah memproses SP2D sebanyak 9.530 dokumen.

- 3) Target capaian indikator Persentase laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan dan tepat waktu tahun 2024 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian

capaian ini telah memenuhi target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%. Capaian ini dibuktikan dengan diserahkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kabupaten Tapin Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Selatan pada Tanggal 5 Maret 2024.






**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

BERITA ACARA SERAH TERIMA
 Nomor 12/BAST-LK/XIX.BJM/3/2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara, Pj. Bupati Tapin menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 (LKPD) *Unaudited* Kabupaten Tapin Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 5 Maret 2024
 Tempat : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Pihak yang menyerahkan
 Nama : Muhammad Syarifuddin, M.Pd.
 Jabatan : Pj. Bupati Tapin

Pihak yang menerima
 Nama : Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.
 Jabatan : Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Pihak yang Menyerahkan



Muhammad Syarifuddin, M.Pd.

Pihak yang Menerima



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.

Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 bulan setelah

tahun anggaran berakhir (yaitu 31 Maret) tercantum secara tegas dalam Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir." Sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Tapin telah melaksanakan penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

- b. Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Target capaian indikator Persentase kesesuaian pentausahaan barang milik daerah antara pengelola barang milik daerah dengan SKPD tahun 2024 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%. Capaian ini dibuktikan dengan telah dilakukannya rekonsiliasi data barang milik daerah antara pengelola barang milik daerah dengan seluruh SKPD di Kabupaten Tapin. Pelaksanaan rekonsiliasi ini lakukan dari tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan 10 Januari 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Datu Nuraya. RT.01 Kel. Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru

R A N T A U

Kode Pos 71111

Nomor : 000.2.1 / ~~006~~ / BKAD-PBMD/XII/2024 Rantau, 31 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Input dan Rekonsiliasi Data
Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV
Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth.
Seluruh Kepala SKPD
dilingkungan Pemkab. Tapin
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya percepatan Penyusunan Neraca Aset sebagai pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini diminta kepada saudara untuk dapat menugaskan (dua) orang Pejabat Pengelola Barang dalam rangka input data Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV Tahun 2024 serta pengisian data-data pada KIB Simda BMD yang masih kurang.

Adapun jadwal input data untuk SKPD (terlampir)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. **PJ. BUPATI TAPIN**

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. PJ. Bupati Tapin (sebagai laporan);

JADWAL INPUT DAN REKONSILIASI DATA AWAL
PENGADAAN TRIULAN IV TAHUN ANGGRA 2024

HAKU / TANGGAL Jam Tempat	Input Selasa, 07 Januari 2025 08.30 yd Selesai Aula BKAD Lantai II	Input Rabu, 08 Januari 2025 08.30 yd Selesai Aula BKAD Lantai II
SKPD	1 Sekretariat DPRD	Sekretariat Daerah
	2 Dinas Kependudukan dan Keluarga	Dinas Perpusakaan dan Kearsipan
	3 Dinas Perdagangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
	4 Dinas Perindustrian	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	5 Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tenaga Kerja
	6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan	Dinas Sosial
	7 Dinas Pertanian	Dinas Ucnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	8 Badan Kestuan Bangsa dan Politik	Dinas Kemberdayaan Pemuda dan Perlindungan Anak
	9 Dinas Kesehatan	Dinas Perikanan
	10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pendidikan
	11 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RSUD Datu Sanggul
	12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Luarang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	13 Dinas Perhubungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	14 Dinas Kelurahan Pengen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	15 Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	16 Badan Pendapatan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
	17 Inspektoriat	Kecamatan Panti
	18 Kecamatan Candi Laras Utara	Kecamatan Tapin Utara
	19 Kecamatan Candi Laras Selatan	Kecamatan Lokpaikat
	20 Kecamatan Tapin Tengah	Kecamatan Bungar
	21 Kecamatan Bakarangan	Kecamatan Salan Babaris
	22 Kecamatan Bnuang	Kecamatan Tapin Selatan
	23 Kecamatan Halungan	

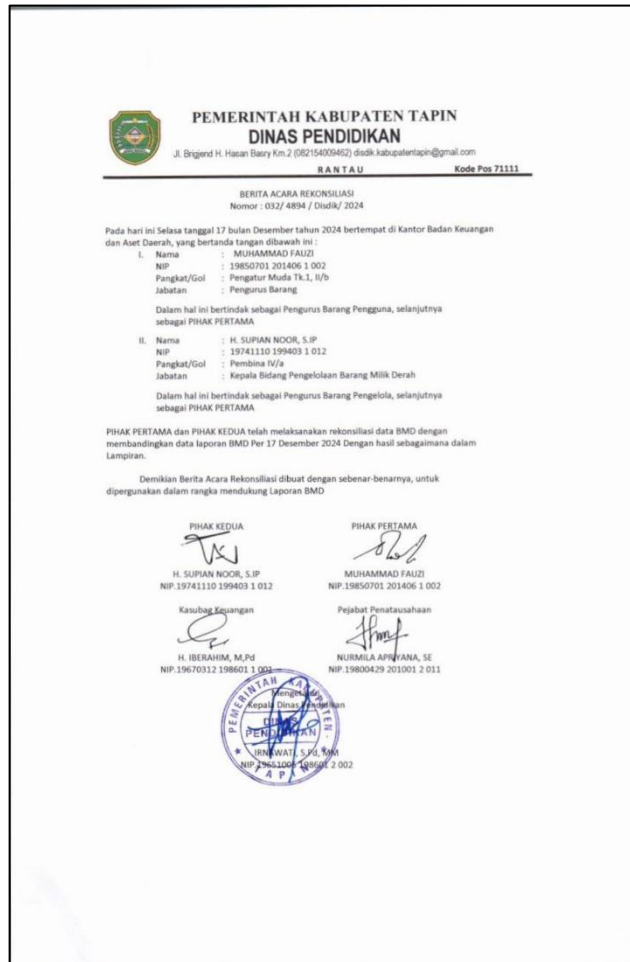
Catatan :

- Membawa photocopy Kertas Kerja Pengadaan Barang milik daerah;
- Membawa photocopy Kelengkapan SP2D Pengadaan
- Membawa Lampiran Pendukung lainnya

**JADWAL REKONSILIASI DATA AWAL PENGADAAN TRIULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2024**

HARI / TANGGAL Jam Tempat		Rekonsiliasi Kamis, 09 Januari 2025 08.30 s/d Selesai Aula II BKAD Lantai II	Rekonsiliasi Jumat, 10 Januari 2025 08.30 s/d Selesai Aula II BKAD Lantai II
SKPD	1	Sekretariat DPRD	Sekretariat Daerah
	2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Dinas Perdagangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
	4	Dinas Perindustrian	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tenaga Kerja
	6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Sosial
	7	Dinas Pertanian	Dinas Pemananan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9	Dinas Kesehatan	Dinas Perikanan
	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pendidikan
	11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RSUD Duto Sanggul
	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	13	Dinas Perhubungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	14	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Keuangan dan Aseel Daerah
	16	Badan Pendapatan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
	17	Inspektoral	Kecamatan Panti
	18	Kecamatan Candi Laras Utara	Kecamatan Tapin Utara
	19	Kecamatan Candi Laras Selatan	Kecamatan Lokpaikat
	20	Kecamatan Tapin Tengah	Kecamatan Bungur
	21	Kecamatan Bakarung	Kecamatan Salam Baharis
	22	Kecamatan Bimang	Kecamatan Tapin Selatan
	23	Kecamatan Hutungan	

Hasil dari rekonsiliasi data barang milik daerah antara pengelola barang milik daerah dengan seluruh SKPD dibuktikan dengan berita acara rekonsiliasi.



Sampel berita acara rekonsiliasi dengan SKPD





Dokumentasi kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah

B. Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

B.1 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan rumus hitung sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Hitung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP diukur melalui 4 (empat) komponen penilaian meliputi : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Internal

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

SAKIP Perangkat Daerah merujuk pada implementasi sistem ini di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti dinas, badan, atau kantor yang berada di bawah pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Tujuan SAKIP di Perangkat Daerah

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Agar setiap OPD dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada publik secara transparan.
2. Mendorong Efektivitas dan Efisiensi Anggaran
SAKIP memastikan bahwa anggaran digunakan berdasarkan pencapaian kinerja yang terukur dan berdampak.
3. Memperkuat Budaya Kinerja Menumbuhkan orientasi hasil dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.

Komponen Utama SAKIP Perangkat Daerah

1. Perencanaan Kinerja
 - Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja) OPD.

- Penetapan indikator kinerja utama (IKU) yang SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound).
2. Pengukuran Kinerja
 - Dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja.
 - Digunakan instrumen seperti laporan kinerja dan pemantauan realisasi anggaran.
 3. Pelaporan Kinerja
 - Output utama berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP).
 - LKjIP menyajikan capaian target, realisasi anggaran, serta analisis capaian dan kendala.
 4. Evaluasi Kinerja
 - Evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal oleh instansi pembina (seperti KemenPANRB).
 - Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Manfaat Implementasi SAKIP

- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
- Mendorong inovasi dan efisiensi dalam pelaksanaan program.
- Memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan kebijakan berbasis data.

Penilaian dan Penghargaan

Setiap tahun, implementasi SAKIP dinilai oleh Kementerian PAN-RB dan diberikan predikat mulai dari CC, B, BB, A hingga

AA. Predikat ini menjadi indikator kualitas akuntabilitas kinerja di masing-masing OPD.

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	74,60	Sedang

Analisis ketercapaian Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Tercapai BB terhadap target A, dengan demikian prosentase terhadap target sebesar 74,60%. Nilai Sakip sebesar 74,60 yang diperoleh BKAD merupakan penjumlahan dari 4 komponen Sakip, antara lain:

Tabel 3.16 Capaian Komponen SAKIP Tahun 2024

Komponen yang dinilai	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	23,70
b. Pengukuran Kinerja	23,10
c. Pelaporan Kinerja	9,30
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja	74,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB

B.2 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024

No.	Indikator	2023			2024		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (100)	BB (73,25)	73,25	A (100)	BB (74,60)	74,60

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yaitu dari nilai 73,25% menjadi 74,60% meningkat sebesar 1,35%. Nilai Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2023 dan 2024 per komponen dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Komponen Sasaran 2 Tahun 2024

Komponen yang dinilai	Nilai 2023	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	23,10	23,70
b. Pengukuran Kinerja	23,10	23,10
c. Pelaporan Kinerja	11,55	9,30
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15,50	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja	73,25	74,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB

B.3 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dibandingkan dengan target jangka menengah

**Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah**

No.	Indikator	2024			Target Akhir RPD	Capaian s.d 2024 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	74,60	A	74,60

Capaian target indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 terhadap target tahun 2026 sebesar 74,60%, walaupun belum 100% tetapi optimis target indikator ini akan tercapai pada tahun 2026 dengan komitmen bersama kepala SKPD dan seluruh Jajaran di BKAD Kabupaten Tapin.

A.4 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dibandingkan dengan standar nasional.

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 Dengan Target Nasional

No.	Indikator	2024			Standar Nasional	Capaian 2024 terhadap Standar Nasional (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (100)	BB (74,60)	74,60	100	74,60

Capaian target indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 terhadap standar nasional adalah sebesar 74,60% dengan peringkat akuntabilitas BB. Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2024 dibandingkan dengan standar nasional per komponen dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 Dengan Nilai Standar Nasional

Komponen yang dinilai	Nilai Standar Nasional	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	23,70
b. Pengukuran Kinerja	30	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15	9,30
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	74,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	A	BB

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian dengan Capaian Kabupaten dan Provinsi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
		Nilai SAKIP BKAD	Nilai SAKIP Kabupaten Tapin	Nilai SAKIP Provinsi Kalsel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,60 (BB)	71,00 (BB)	A

Nilai SAKIP BKAD pada tahun 2024 ini mendapat predikat BB dengan nilai 74,60 dibandingkan dengan Nilai Kabupaten Tapin adalah predikat BB dengan nilai 71,00 dan Nilai Sakip Provinsi Kalsel adalah predikat A.

B.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan pada Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah:

Faktor Pendukung

1. Adanya dokumen rencana aksi dan RKA yang menjadi pedoman pelaksanaan kinerja BKAD baik kinerja yang menghasilkan outcome maupun kinerja keuangan (anggaran)
2. Komitmen Pimpinan dan Aparatur
Adanya komitmen dari pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan sistem AKIP, terbukti dengan skor keseluruhan 74,60 yang tergolong “Baik”.
3. Peningkatan Sistem Informasi
Adanya penggunaan sistem informasi manajemen kinerja yang membantu memudahkan proses perencanaan dan pengukuran kinerja.
4. Penyusunan Laporan Kinerja
Penyusunan laporan kinerja dapat menggambarkan proses manajemen kinerja, sehingga bisa dilakukan analisis terkait hal apa saja yang bisa meningkatkan kinerja maupun yang dapat menurunkan kinerja.

Faktor Penghambat

1. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap target rencana aksi belum dilaksanakan secara optimal
2. Kurangnya pemahaman dan komitmen pegawai di BKAD dalam melakukan pencapaian target rencana aksi

Alternative solusi yang telah dilakukan

Optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala dengan merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pegawai di BKAD.

B.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Selain capaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 74,60% meningkat dari tahun 2023 73,25%, realisasi anggaran terkait pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga mengalami efisiensi, yaitu dari yang dianggarkan sebesar Rp14.862.929.106,- terealisasi sebesar Rp13.563.583.405,- atau terjadi efisiensi sebesar Rp1.299.345.701,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB (74,60)	74,60	14.862.929.106	13.563.583.405	91,26	1.299.345.701

B.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pada Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.24 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang
Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pada Sasaran Tahun 2024**

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai Komponen AKIP : Perencanaan Kinerja	30 Nilai	23,7 Nilai	79%
		Nilai Komponen AKIP : Pengukuran Kinerja	30 Nilai	23,1 Nilai	77%
		Nilai Komponen AKIP : Pelaporan Kinerja	15 Nilai	9,3 Nilai	62%
		Nilai Komponen AKIP : Evaluasi Internal	25 Nilai	18,5 Nilai	74%
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	95%	95%	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	98%	87,16%	88,94%
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.1.1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	100%
	1.1.2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Lap	7 Lap	100%
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	34 Org/Bln	34 Org/Bln	100%
	1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%	100%	100%
	1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.6. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	1 Lap	100%
	1.3.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%	99,49%	99,49%
	1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	64 Unit	100%
	3.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	100%	100%
	1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100%
	1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%
	1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%
	3.2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%	99,49%	99,49%
	1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	6 Unit	6 Unit	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	100%
	1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%

Capaian tersebut didukung dari Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Komponen AKIP : Perencanaan Kinerja, dengan skor sebesar 23,7 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 79% (belum memenuhi target). Nilai Komponen AKIP : Pengukuran Kinerja, dengan skor sebesar 23,1 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 77% (belum memenuhi target). Nilai Komponen AKIP : Pelaporan Kinerja, dengan skor sebesar 9,3 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 62% (belum memenuhi target). Nilai Komponen AKIP : Evaluasi Internal, dengan skor sebesar 18,5 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 74% (belum memenuhi target).

Capaian indikator diatas dibuktikan dengan :

- Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) oleh Inspektorat

- Monev internal untuk memetakan kegiatan-kegiatan apa yang mengalami hambatan dan mencari solusi secara Bersama terhadap hambatan yang ditemukan setiap triwulan

C. Sasaran 3: Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah.

C.1 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN.

Kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan rumus hitung sebagai berikut:

Tabel 3.25 Indikator Dan Rumus Hitung Pada Sasaran 3 Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Hitung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	IP-ASN Perangkat Daerah diukur dari 4 (empat) dimensi yaitu : 1. Kualifikasi 2. Kompetensi 3. Kinerja 4. kedisiplinan

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Tujuan utama dari IP-ASN adalah untuk:

1. Mengukur dan mengevaluasi profesionalitas ASN secara objektif dan terukur.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
3. Mendorong pengembangan ASN agar lebih kompeten, berintegritas, dan produktif.
4. Menjadi dasar perumusan kebijakan manajemen ASN, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dimensi Penilaian IP-ASN

IP-ASN biasanya mengukur empat dimensi utama profesionalitas ASN:

1. Kualifikasi: Tingkat pendidikan ASN sesuai dengan jenjang jabatan atau tugas yang diemban.
2. Kompetensi: Kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural yang dimiliki oleh ASN.
3. Kinerja: Capaian hasil kerja berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
4. Disiplin dan Etika: Kepatuhan terhadap peraturan dan norma etika profesi ASN.

Manfaat IP-ASN bagi Perangkat Daerah

- Peningkatan kualitas layanan publik melalui ASN yang profesional.
- Identifikasi kebutuhan pengembangan SDM, seperti pelatihan dan promosi.
- Monitoring efektivitas kebijakan kepegawaian di lingkungan daerah.

- Sebagai dasar penghargaan atau pembinaan terhadap kinerja ASN.

Kategori tingkat IP ASN

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

Kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	75,01	115,40	Tinggi

Analisis ketercapaian Sasaran 3: Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tercapai 75,01 terhadap target 65, dengan demikian prosentase terhadap target sebesar 115,40%. Tingkat Profesionalitas dengan hasil 75,01 berada pada rentang 71-80 yaitu Sedang. Nilai IP-ASN sebesar 75,01 yang diperoleh BKAD merupakan penjumlahan dari 4 dimensi utama, antara lain:

Tabel 3.27 Capaian Kinerja 4 Dimensi Utama Sasaran 3 Tahun 2024

Dimensi	Uraian	Bobot
1	Kualifikasi	23,42
2	Kompetensi	21,59
3	Kinerja	25
4	Disiplin	5
	Indeks Total	75,01

C.2 Hasil Target dan Realisasi pada 3 : Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	2023			2024		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)
1	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	60	45,58	75,97	65	75,01	115,40

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yaitu dari nilai 75,97% menjadi 115,40% meningkat sebesar 39,43%. Nilai Realisasi Indeks Profesionalitas ASN 2023 dan 2024 per dimensi dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.29 Capaian Kinerja 4 Dimensi Utama Sasaran 3 Tahun 2024
Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya**

Dimensi	Uraian	Bobot 2024	Bobot 2024
1	Kualifikasi	14,69	23,42
2	Kompetensi	4,64	21,59
3	Kinerja	21,25	25
4	Disiplin	5	5
	Indeks Total	45,58	75,01

C.3 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN dibandingkan dengan target jangka menengah

**Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 Dibandingkan
Dengan Target Jangka Menengah**

No.	Indikator	2024			Target Akhir RPD	Capaian s.d 2024 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	75,01	115,40	67	111,96

Capaian target indikator Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 terhadap target tahun 2026 sebesar 111,96%, walaupun sudah tercapai 100% tetapi BKAD akan terus berupaya meningkatkan capaian sampai dengan tahun 2026 dengan komitmen bersama kepala SKPD dan seluruh Jajaran di BKAD Kabupaten Tapin.

C.4 Hasil Target dan Realisasi pada Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN dibandingkan dengan standar nasional.

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Standar Nasional

No.	Indikator	2024			Standar Nasional	Capaian 2024 terhadap Standar Nasional (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	75,01	115,40	100	75,01

Capaian target indikator Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 terhadap standar nasional adalah sebesar 75,01% dengan peringkat Sedang. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN 2024 dibandingkan dengan standar nasional per dimensi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.32 Capaian Kinerja 4 Dimensi Sasaran 3 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Dimensi	Uraian	Nilai Standar Nasional	Bobot 2024
1	Kualifikasi	25	23,42
2	Kompetensi	40	21,59
3	Kinerja	30	25
4	Disiplin	5	5
	Indeks Total	100	75,01

**Tabel 3.33 Perbandingan Capaian dengan Capaian
Kabupaten/Provinsi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
		BKAD	Kabupaten	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	75,01	78,08	80,73

Indeks Profesionalitas ASN BKAD pada tahun 2024 ini berada pada Tingkat Profesionalitas Sedang dengan nilai 75,01 dibandingkan dengan Nilai Kabupaten Tapin adalah Tingkat Profesionalitas Sedang dengan nilai 78,08 dan Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kalsel adalah juga Tingkat Profesionalitas Sedang dengan nilai 80,73.

- C.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN:

Faktor Pendukung

1. Kompetensi dan Profesionalitas ASN Sekretariat
ASN memiliki pemahaman tugas yang baik, mampu melayani dengan cepat, tepat, dan ramah, serta menunjukkan integritas dalam bekerja.
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Tersedianya fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu yang

nyaman, loket pelayanan yang tertata, serta akses informasi yang mudah melalui media digital.

3. Responsivitas Petugas Pelayanan

Petugas responsif dalam menangani keluhan atau pertanyaan dari masyarakat, serta memberikan solusi secara cepat.

4. Budaya Kerja yang Positif

Lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan motivasi dalam memberikan pelayanan prima.

Faktor Penghambat

1. Belum Optimalnya Capaian Target (di bawah 90%)

Meskipun skor cukup tinggi, namun masih di bawah target maksimal. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan pelayanan.

2. Keterbatasan SDM di Beberapa Unit Pelayanan

Jumlah petugas yang terbatas atau beban kerja yang tidak seimbang dapat menyebabkan pelayanan menjadi lambat atau tidak maksimal.

3. Kurangnya Sosialisasi Layanan

Masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengetahui prosedur layanan atau saluran pengaduan, sehingga persepsi terhadap pelayanan kurang optimal.

4. Gangguan Teknis atau Infrastruktur

Masalah seperti gangguan jaringan internet atau fasilitas yang rusak dapat menurunkan kualitas pelayanan.

C.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 3 :
Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan tahun 2024 dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN.

Selain capaian kinerja Nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 74,60% meningkat dari tahun 2023 73,25%, realisasi anggaran terkait pencapaian Indeks Profesionalitas ASN juga mengalami efisiensi, yaitu dari yang dianggarkan sebesar Rp14.862.929.106,- terealisasi sebesar Rp.13.563.583.405,- atau terjadi efisiensi sebesar Rp1.299.345.701,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.34 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 3 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	75,01	115,40	14.862.929.106	13.563.583.405	91,26	1.299.345.701

C.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pada Sasaran 3 : Meningkatkan Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan tahun 2024 dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.35 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang
Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pada Sasaran 3 Tahun 2024**

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai Komponen AKIP : Perencanaan Kinerja	30 Nilai	23,7 Nilai	79%
		Nilai Komponen AKIP : Pengukuran Kinerja	30 Nilai	23,1 Nilai	77%
		Nilai Komponen AKIP : Pelaporan Kinerja	15 Nilai	9,3 Nilai	62%
		Nilai Komponen AKIP : Evaluasi Internal	25 Nilai	18,5 Nilai	74%
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	95%	95%	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	98%	87,16%	88,94%
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.1.3.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	100%
	1.1.4.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Lap	7 Lap	100%
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
	1.2.4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	34 Org/Bln	34 Org/Bln	100%
	1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
	1.2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%	100%	100%
	1.3.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.14. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%
	1.3.15. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	1 Lap	100%
	1.3.16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%	99,49%	99,49%
	1.4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	64 Unit	100%
	3.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	100%	100%
	1.5.4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100%
	1.5.5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%
	1.5.6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%
	3.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%	99,49%	99,49%
	1.6.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	6 Unit	6 Unit	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	1.6.5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	100%
	1.6.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%

Capaian tersebut didukung dari Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Indeks kepuasan pelayanan sekretariat dengan skor sebesar 87,16 dengan prosentase terhadap target sebesar 88,94%.

Capaian indikator diatas dibuktikan dengan :

- Hasil survei kepuasan pelayanan

3.4 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.36 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per
Sasaran Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	66,977	89,30	273.732.538.582	177.408.766.155	64,81	96.323.772.427
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB (74,60)	74,60	14.862.929.106	13.563.583.405	91,26	1.299.345.701
3	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	75,01	115,40				
Jumlah						288.595.467.688	109.972.349.560	66,17	97.623.118.128

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah pada sasaran nomor satu dan dua masih belum memenuhi target sedangkan sasaran nomor tiga dapat melampaui target kinerja pada tahun 2024 ini. Realisasi anggaran dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.288.595.467.688,- terealisasi Rp.109.972.349.560,- atau 66,17%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 3 sasaran strategis. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tercapai 89,30%, Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tercapaian 74,60%, dan Sasaran strategis Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah tercapai 115,40%
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Penyerapan Anggaran masih rendah, dan Kondisi Keuangan Daerah masih rendah.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat penetapan APBD, meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat monitoring dan evaluasi,
2. Meningkatkan PAD, meningkatkan efisiensi belanja, menekan belanja pegawai, meningkatkan akuntabilitas

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rantau, Februari 2025

Badan Keuangan dan Aset Daerah



Haris Fadhilah, SE.,MM

NIP. 19740626 200501 1 005

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris Fadhilah, SE, MM

Jabatan : Kepala BKAD Kab.Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarifuddin, M.Pd

Jabatan : Pj. Bupati Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,

Muhammad Syarifuddin, M.Pd

Pihak Pertama,

Haris Fadhilah, SE, MM
NIP. 19740626 200501 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
3	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.043.371.434	
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 4.060.931.540	
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.742.690.060	
	Jumlah Anggaran	Rp. 17.846.993.034	

Pt. Bupati Tapan,

Muhammad Syarifuddin, M.Pd

Rantau, 15 Februari 2024
Kepala Badan Keuangan Daerah,

Haris Fadillah, SE, MM
NIP. 19740626 200501 1 005